

Dynamics of Political Life in an Economic Framework

Katherin Yap¹, Jesslyn², Jadrian Oliver Taher³, Vania Wijaya⁴, Federico Wisely⁵,
Rolib Sitorus^{6*}

¹⁻⁵Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pelita Harapan, Medan

⁶Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan

Corresponding Author: Rolib Sitorus rolib.sitorus@uph.edu

ARTICLE INFO

Keywords : Policy, Economy,
Growth, Politics, Overnment

Received : 03 November

Revised : 24 November

Accepted: 27 December

©2024 Yap, Taher, Wijaya,
Wisley, Sitorus: This is an
open-access article
distributed under the terms
of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The descriptions of the dynamics of political life in the economic framework are aimed at determining the relationship between the dynamics of political and economic life in Indonesia, to determine the impact of economic policies influenced by political dynamics on the growth and welfare of society. While the method used is library research. This library study method is carried out by collecting information from various sources online, such as books, journal articles, and research reports. Through this data collection, researchers can understand relevant theories and contexts related to the topic being studied. And the results achieved are in the context of the political and economic journey in Indonesia, the relationship between political policies and economic frameworks has proven to be very close and mutually influential, and high and quality economic growth is the main goal of a country, and political policies play an important role in achieving it. Various policies, such as fiscal, monetary, international trade, and inclusive financial policies, have proven effective in driving economic growth and improving public welfare.

Dinamika Kehidupan Politik dalam Kerangka Ekonomi

Katherin Yap¹, Jesslyn², Jadrian Oliver Taher³, Vania Wijaya⁴, Federico Wisley⁵, Rolib Sitorus^{6*}

¹⁻⁵Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pelita Harapan, Medan

⁶Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan

Corresponding Author: Rolib Sitorus rolib.sitorus@uph.edu

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan, Ekonomi, Pertumbuhan, Politik, Pemerintah

Received : 03 November

Revised : 24 November

Accepted: 27 Desember

©2024 Yap, Taher, Wijaya, Wisley, Sitorus: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Uraian-uraian mengenai dinamika kehidupan politik dalam kerangka ekonomi adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dinamika kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia, untuk mengetahui dampak dari kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika politik terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara online, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Melalui pengumpulan data ini, peneliti dapat memahami teori-teori yang relevan serta konteks yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dan hasil yang dicapai adalah dalam konteks perjalanan politik dan ekonomi di Indonesia, hubungan antara kebijakan politik dan kerangka ekonomi terbukti sangat erat dan saling mempengaruhi, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah tujuan utama suatu negara, dan kebijakan politik memainkan peran penting dalam mencapainya. Berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan keuangan inklusif, terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang berkembang pesat di dunia. Dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sering kali merancang kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan ini, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Kehidupan ekonomi dalam suatu negara akan selalu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan politik. Ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung meningkat. Hal ini menciptakan suasana politik yang kondusif, di mana masyarakat lebih mendukung kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, sebaliknya, krisis ekonomi dapat memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang sering kali berujung pada protes dan gerakan sosial. Situasi ini dapat menciptakan masalah politik yang signifikan, seperti ketidakstabilan pemerintahan.

Perubahan kepemimpinan dan partai politik yang berkuasa juga sering kali menghasilkan kebijakan ekonomi yang berbeda, sesuai dengan ideologi dan visi masing-masing pemimpin. Dari era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno yang berfokus pada nasionalisme dan pembangunan, hingga era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang menerapkan pendekatan lebih pragmatis dan membuka perekonomian untuk investasi asing. Kedua periode ini membawa dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi dan stabilitas politik. Pada era reformasi, perubahan kepemimpinan dan pergeseran ideologi politik semakin memengaruhi kebijakan ekonomi yang diterapkan. Setiap presiden membawa visi dan prioritas yang berbeda, yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi negara. Misalnya, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi asing menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, penekanan pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang pro-rakyat bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dinamika kehidupan politik dan ekonomi merupakan dua aspek yang saling memengaruhi dan membentuk struktur sosial di masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan antara keduanya sering kali menjadi pusat perhatian dalam studi kebijakan publik, pembangunan, dan stabilitas sosial. Dinamika politik berperan penting dalam menentukan kebijakan ekonomi, sementara kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik.

Rumusan Masalah

Mengingat begitu pentingnya kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara dinamika kehidupan politik dan kebijakan ekonomi di Indonesia?
2. Apa dampak dari kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika politik terhadap kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini sesuai dengan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara dinamika kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh dinamika politik terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik berasal dari kata Yunani "polis," yang berarti negara. Dalam pengertian yang lebih luas, arti politik adalah serangkaian aktivitas yang diciptakan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dinamika kehidupan politik dan kebijakan ekonomi di Indonesia merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi dan membentuk wajah bangsa.

Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur politik dan ekonominya. Berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berlangsung, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi yang diambil tidak hanya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan konteks politik yang melatarbelakanginya. Hal ini menciptakan suatu interaksi yang kompleks, di mana kebijakan ekonomi dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, sementara dinamika politik juga dapat menjadi penghalang atau pendorong dalam implementasi kebijakan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara online, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Melalui pengumpulan data ini, peneliti dapat memahami teori-teori yang relevan serta konteks yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Setelah mengumpulkan informasi, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam literatur yang ada. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibawa, memperkuat argumen serta kesimpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Dinamika Kehidupan Politik dan Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mengalami kondisi politik dan ekonomi yang sulit. Pada pasca 17 Agustus 1945, negara dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah inflasi yang tinggi. Inflasi yang terjadi pada masa itu sebagian besar dipicu oleh kelebihan jumlah uang yang beredar akibat peredaran mata uang asing yang tidak terkontrol, sementara produksi barang belum optimal akibat kerusakan infrastruktur dan konflik bersenjata. Selama masa awal kemerdekaan, terjadi kekacauan internal pemerintahan, inflasi, dan agresi militer Belanda. Kondisi politik yang tidak stabil menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Seiring berjalannya waktu, kondisi politik di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Pemulihan situasi politik ini berdampak positif terhadap ekonomi, dengan perlahan-lahan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk pertumbuhan. Keterkaitan antara politik dan ekonomi menjadi semakin jelas, terlihat dalam berbagai aspek seperti kebijakan publik, pasar, kelas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, stabilitas politik tidak hanya penting untuk menciptakan kepercayaan investor, tetapi juga untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang efektif.

Dalam sejarah politik Indonesia, pergantian kepemimpinan nasional juga berdampak signifikan pada arah kebijakan ekonomi negara. Misalnya pergantian presiden di Indonesia dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo dan kemudian ke Prabowo Subianto. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap kerangka ekonomi negara. SBY, yang fokus pada stabilitas politik dan ekonomi, meletakkan dasar hukum penting seperti UU Pengadaan Tanah yang memfasilitasi proyek infrastruktur besar di era Jokowi. Jokowi, dengan latar belakang sebagai pengusaha dan mantan wali kota, menekankan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, yang memperkuat ekonomi Indonesia menjadi satu-satunya ekonomi triliun dolar di Asia Tenggara.

Prabowo, yang berasal dari latar belakang militer, diperkirakan akan melanjutkan beberapa kebijakan Jokowi, termasuk proyek ibu kota baru, namun dengan pendekatan yang lebih nasionalis dan berfokus pada industrialisasi modern. Pergantian ini mencerminkan bagaimana latar belakang dan prioritas masing-masing presiden mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia. Menjelang pemilihan umum Presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak ke arah lebih positif, yaitu 5,05 persen (2023), yang mendukung penguatan PDB per kapita sebesar 4.919,7 dollar AS.

Di sisi lain, pergantian partai dalam pemilu, seperti penurunan suara PDI-P dan kenaikan suara Gerindra, juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi. Perubahan ini dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan investasi yang dijalankan. Pemilu sering kali menciptakan ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap "wait and see" hingga hasil pemilu jelas. Kebijakan ekonomi yang diusung oleh partai pemenang dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik yang dihasilkan dari pemilu yang damai dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara dinamika politik dan kebijakan ekonomi di Indonesia menciptakan sebuah siklus di mana kebijakan yang baik dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sementara kondisi ekonomi yang baik juga mendukung stabilitas politik.

2. Dampak Kebijakan Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan tujuan utama suatu negara. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan politik memainkan peran penting dalam mendorong dan mengelola perekonomian. Berikut berbagai jenis kebijakan politik yang terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- a. Kebijakan Fiskal (yang terlalu berhubungan dengan pajak negara): Mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasikan uang untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya dan meningkatkan investasi.
- b. Kebijakan Moneter: Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjamin stabilitas harga dan mendukung

pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dapat menciptakan kondisi yang ramah investasi dan konsumsi.

- c. Kegiatan perekonomian dan mencegah krisis keuangan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan makroprudensial berdasarkan dengan UU No 21 tahun 2011 antara lain adalah Loan To Value (LTV), Countercyclical Buffer (CCB), Giro Wajib Minimum (GWM), Capital Surcharge dan sebagainya (silalahi, 2018).
- d. Kebijakan Perdagangan Internasional: Kebijakan perdagangan internasional, seperti pengurangan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan, dapat meningkatkan ekspor dan impor. Kebijakan ini akan mendorong efisiensi dan transfer teknologi serta membuka pasar baru bagi produk dalam negeri.
- e. Kebijakan Keuangan Inklusif dan Ramah Lingkungan: Pemerintah juga mendorong kebijakan keuangan inklusif dan ramah lingkungan yang meliputi Pembiayaan UMKM dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut ramah lingkungan dan adil.
- f. Reformasi Struktural: Reformasi struktural seperti UU Cipta Kerja dan Pembangunan Ibu Kota Indonesia (IKN) merupakan contoh upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Reformasi ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan mendorong investasi.
- g. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Program ini memiliki tujuan untuk mengatasi dampak pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Program tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti stimulus fiskal, dukungan terhadap UMKM, dan program Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk menjaga lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan politik memegang peran penting fundamental dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, kebijakan yang tidak tepat dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan politik yang buruk dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar, inflasi yang tidak terkendali, dan ketidakpastian perekonomian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, langkah-langkah kebijakan politik yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan risiko sistemik yang dapat merugikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah dampak kebijakan politik yang tidak tepat terhadap pertumbuhan ekonomi.

- a. Defisit anggaran yang tinggi: Ini terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan, karena disebabkan oleh buruknya pengelolaan keuangan pemerintah atau biasa disebut dengan korupsi. Pengurangan anggaran yang terus berlanjut dapat menurunkan kepercayaan investor dan bisa meningkatkan beban utang suatu negara (Maulidina, 2017).
- b. Inflasi yang tidak terkendali : Kebijakan moneter yang tidak konsisten atau terlalu ekspansif juga bisa mengakibatkan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian, hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan ketidakpastian ekonomi mari kita lanjutkan tentang ketidakpastian perekonomian.
- c. Ketidakpastian Perekonomian: Ketidakpastian perekonomian dapat timbul apabila kebijakan tidak konsisten dan sering berubah. Ketidakpastian ini menyulitkan pelaku ekonomi untuk merencanakan investasi jangka panjang dan pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- d. Pengeluaran Pemerintah yang ekstrim: Pengeluaran pemerintah yang berlebihan, terutama pada proyek-proyek yang tidak bagus (efisien) dan tidak dilakukan secara produktif, dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. Hal ini dapat menyia-nyiakan sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi produktif dan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- e. Kebijakan Perdagangan terlalu Proteksionis: Terlalu banyak kebijakan perdagangan proteksionis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Proteksionisme cenderung dapat mengurangi efisiensi dan daya saing serta membatasi akses pasar bagi produsen di dalam negeri. Hal ini dapat mengurangi volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Kebijakan Publik yang terlalu Inklusif: Kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan keberagaman dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini bisa menimbulkan konflik sosial dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam konteks perjalanan politik dan ekonomi di Indonesia, hubungan antara kebijakan politik dan kerangka ekonomi terbukti sangat erat dan saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari pergantian kepemimpinan di Indonesia yang memainkan peran

penting dalam kerangka ekonomi negara. Perubahan kepemimpinan, dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo dan kini Prabowo Subianto, menunjukkan bagaimana latar belakang dan prioritas setiap presiden dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dicanangkan oleh masing-masing pemimpin memiliki dampak langsung pada sektor-sektor penting, seperti infrastruktur, yang akan mengarah pada kerangka pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah tujuan utama suatu negara, dan kebijakan politik memainkan peran penting dalam mencapainya. Berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan keuangan inklusif, terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan yang tidak tepat juga dapat berdampak negatif, seperti defisit anggaran yang tinggi, inflasi tak terkendali, dan ketidakpastian perekonomian, yang semuanya dapat menghambat pertumbuhan kerangka ekonomi negara.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi di Indonesia, pemerintah disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dan transparan dalam perumusan kebijakan. Hal ini mencakup setiap kebijakan yang dibuat harus konsisten, serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, strategi kebijakan yang dibuat harus berkualitas dan juga berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa semua kebijakan memiliki dasar yang kuat dan didasarkan pada data serta analisis yang komprehensif. Selain itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang mendorong investasi produktif dan menciptakan lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Akmal (dkk). 2021. Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat. *Jurnal Terapan Pemerintah Minangkabau*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.
- Bland, B. (2021). Reappraising the economic legacy of Susilo Bambang Yudhoyono. *The Diplomat*. Diakses dari <https://thediplomat.com/2021/09/reappraising-the-economic-legacy-of-susilo-bambang-yudhoyono/>
- Bremmer, Ian (2013). *The J Curve: Strategi Memahami Mengapa Bangsa-bangsa Berjaya dan Jatuh*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Crouch, Harold. (1986). *Militer dan P*
- Romli, lili. 2017. Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica* Vol. 8 No. 2 November 2017.
- Suryani, E. (2018). Analisis demokrasi internal partai dalam rekrutmen calon kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Diakses dari <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25181/BAB%201.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Universitas Airlangga. (2023). Pengaruh pemilu 2024 terhadap harapan ekonomi dan tantangan ketidakpastian. Diakses dari <https://unair.ac.id/pengaruh-pemilu-2024-terhadap-harapan-ekonomi-dan-tantangan-ketidakpastian/>
- Wirawan, I Gusti Made Arya Suta (dkk). 2021. Dinamika Konflik Politik Di Ruang Digital Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 6, No. 1, Desember 2021